



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 80 /B.03/HK/2021

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu disusun perencanaan program penyusunan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2021.**

- KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk:
- a. Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan evaluasi, fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Pencabutan Peraturan Gubernur; dan
 - c. Perubahan Peraturan Gubernur.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat menyusun Rancangan Peraturan Gubernur di luar Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila:
- a. untuk mengatasi keadaan luarbiasa;
 - b. untuk mengatasi keadaan konflik;
 - c. untuk mengatasi keadaan bencana alam;
 - d. adanya akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 80 /B.03/HK/2021
 TANGGAL : 22 - 1 - 2021

PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2021

NO	INSTANSI PENGUSUL	JUDUL PERGUB	PERTIMBANGAN DAN DASAR PENYUSUNAN
1	Badan Kepegawaian Daerah	Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pola Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19	Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Renstra Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
		2. Prioritas Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
		3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
		4. Master Plan <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
		5. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
		6. Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama (Perseroan Daerah) Dalam Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni <i>Harbour City</i>	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

3	Badan Pendapatan Daerah	Pemberian Keringanan, Pengurangan dan/atau Pembebasan Terhadap Pokok, Denda dan Bunga Atas Hutang Pajak Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2021	Menampung kebijakan daerah dalam mengatur dampak pandemi COVID-19
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
		2. Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional
		3. Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber Dari APBD	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		4. Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		5. Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		6. Tata Cara Penggeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		7. Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjuti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		9. Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	Tindaklanjuti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
		10. Pedoman Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
5	Inspektorat	1. Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Arahan dari KPK RI

		2. Pengaduan Masyarakat	Tindak lanjut Peraturan Menteri PAN Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
6	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengelolaan Sampah
		2. Tarif Pengujian Parameter Pemantauan Kualitas Lingkungan Pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
7	Dinas Perkebunan	Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Tandan Buah Segar Produksi Pekebun di Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebunan.
8	Dinas Kesehatan	1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Tindaklanjut dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung
		3. Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		5. Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD (PPK BLUD) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		7. Pedoman Tata Kelola (<i>Hospital By Laws</i>) RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD

9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1. Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
		2. Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi	Kawasan Perdesaan dan Kawasan Lainnya	Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
11	Rumah Sakit Jiwa Daerah	1. Penetapan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		2. Penetapan Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
		3. Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1. Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, Arsip Terjaga dan Pemeliharaan Arsip Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		2. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyelenggaraan Kearsipan
13	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kerjasama Daerah Provinsi Lampung
		2. Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gubernur Lampung Dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung	Tindaklanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

		4. Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pelayanan Publik di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	Tindaklanjuti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
14	Biro Organisasi	1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
		2. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025
		3. Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Tindaklanjut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
15	Sekretariat DPRD	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung	Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	1. Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan di Provinsi Lampung	Tindaklanjut pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
		2. Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK)	Tindaklanjut pelaksanaan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
17.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJI